

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan tingkat pengiriman tenaga kerja migran yang tinggi. Banyak masyarakat Indramayu, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, memilih untuk bekerja di luar negeri karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang memadai di daerah asal mereka. Meskipun bekerja di luar negeri dapat menawarkan peluang pendapatan yang lebih tinggi, fenomena migrasi ini seringkali membawa konsekuensi yang kompleks, baik bagi pekerja migran maupun keluarga yang ditinggalkan. Kondisi ini menyebabkan peran pemerintah daerah menjadi penting dalam mengurangi angka migrasi tenaga kerja, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja lokal yang berkelanjutan dan sosialisasi tentang risiko serta hak-hak tenaga kerja migran (Lelisari, et al., 2021)

Fenomena migrasi secara khusus, dari Indramayu ke luar negeri menjadi perhatian serius mengingat sebagian besar pekerja yang berangkat berasal dari sektor informal dan memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan tidak adil di negara tujuan. Studi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tenaga kerja migran yang ketat dan adanya sistem sosialisasi yang baik di tingkat desa dapat mengurangi risiko tersebut. Namun, untuk daerah dengan kapasitas yang terbatas seperti Indramayu, dukungan dari pemerintah daerah sangat krusial agar sosialisasi perlindungan hukum ini dapat berjalan efektif (Sulistiyo & Widayati 2018).

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri masih menjadi pilihan bagi banyak masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan peluang ekonomi di kampung halaman. Di balik keputusan untuk menjadi pekerja migran, tersimpan harapan akan kehidupan yang lebih layak bagi diri sendiri dan keluarga. Untuk memahami pola dan intensitas migrasi tersebut, penting untuk melihat data penempatan Pekerja Migran Indonesia

(PMI) dari tahun ke tahun. Tabel berikut menyajikan jumlah penempatan PMI berdasarkan asal kabupaten/kota selama periode 2021 hingga 2023, yang dapat menjadi dasar dalam menganalisis peran pemerintah daerah dalam menangani isu migrasi tenaga kerja.

**Tabel 1. 1 Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

NO	KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	JUMLAH
1	Indramayu	5.262	12.797	19.178	37.237
2	Lombok Timur	2.490	8.885	13.111	22.486
3	Cilacap	3.433	8.681	11.344	23.458
4	Lombok Tengah	552	7.138	10.840	18.530
5	Cirebon (Kab)	2.624	7.641	10.552	20.817
6	Ponorogo	1.920	6.960	8.617	17.497
7	Blitar	4.624	6.961	8.634	20.219
8	Lampung Timur	1.638	5.908	8.550	16.096
9	Malang	4.831	6.520	7.447	18.798
10	Tulungagung	2.356	5.532	7.141	14.769
11	Subang	1.558	3.891	6.740	12.189
12	Kendal	1.501	5.848	6.708	14.057
13	Brebes	1.344	4.912	6.582	12.838
14	Banyuwangi	2.345	4.336	5.561	12.542
15	Lombok Barat	114	4.093	4.152	8.359
16	Madiun	921	3.533	3.682	8.136
17	Pati	961	3.285	3.770	8.016
18	Grobogan	921	2.577	3.553	7.051
19	Kediri	1.685	2.752	2.593	7.030
20	Karawang	1.624	2.506	3.545	6.649
21	Banyumas	843	2.395	3.335	6.573
22	Trenggalek	1.046	1.692	2.991	5.729
23	Lampung Tengah	612	1.922	3.051	5.585
24	Kebumen	622	1.698	2.879	5.199
25	Majalengka	622	1.707	2.819	5.148
26	Lainnya	23.229	68.877	105.154	206.060
	<b>Jumlah</b>	72.624	200.802	274.965	548.391

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tahun 2024

Tabel yang ditunjukkan adalah data penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia selama tiga tahun terakhir (2021, 2022, dan 2023). Data ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Indramayu berada di urutan teratas dalam hal jumlah pekerja migran yang dikirim ke luar negeri dengan total 37.257 orang dalam periode tersebut. Hal ini

menunjukkan tingginya tingkat migrasi tenaga kerja dari Indramayu ke luar negeri dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Fenomena ini memperkuat argumen penelitian bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi faktor-faktor yang mendorong migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja lokal, meningkatkan keterampilan kerja masyarakat, dan mengedukasi calon tenaga kerja tentang risiko dan peluang yang terkait dengan bekerja di luar negeri. Jika pemerintah daerah berhasil mengatasi penyebab ekonomi yang mendorong masyarakat untuk bermigrasi, diharapkan angka migrasi tenaga kerja dari Indramayu ke luar negeri dapat berkurang secara signifikan.

Data ini juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung kesejahteraan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Indramayu guna menciptakan alternatif-alternatif ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan di luar negeri.

Menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah meluncurkan kebijakan dan program yang ditujukan untuk memperluas akses terhadap pekerjaan lokal. Salah satunya adalah Peraturan Bupati Indramayu Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, yang bertujuan menciptakan iklim kerja yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi produktif di daerah. Lebih lanjut, melalui Keputusan Bupati Indramayu Nomor 264/Kep.405-Disnaker/2021, diluncurkan program Perempuan Berdikari (Pe-Ri) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan purna pekerja migran. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga pendampingan usaha dan akses permodalan agar purna PMI dapat membangun usaha di kampung halaman tanpa perlu kembali bekerja ke luar negeri.

Ditinjau dari perspektif teoretis *governance* yang dikemukakan oleh (Rhodes 1996), pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengelola dan

mengarahkan dinamika sosial-ekonomi di wilayahnya. Teori desentralisasi yang dikembangkan oleh (Rondinelli 1981) juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Sejalan dengan pendapat (Engkus, et al., 2019) yang menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Kabupaten Indramayu telah meluncurkan sebuah inisiatif Program bernama Perempuan Berdikari, yang bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kemandirian ekonomi para perempuan yang pernah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap purna PMI dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan. Harapannya, para purna PMI tidak perlu lagi mengadu nasib ke luar negeri, melainkan dapat membangun usaha mandiri di tanah kelahiran mereka.

Program Perempuan Berdikari tidak hanya sekadar menyelenggarakan pelatihan, tetapi juga memberikan pendampingan serta akses permodalan yang difasilitasi oleh Bank BJB. Para peserta program akan mendapatkan berbagai materi pelatihan yang mencakup motivasi kewirausahaan, pelatihan keterampilan, manajemen keuangan, legalitas dan kemasan produk, hingga strategi pemasaran. Dengan demikian, diharapkan para peserta dapat mengembangkan usaha yang berkelanjutan dan mandiri.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Sri Wulaningsih, pada tahun 2021, program ini menargetkan 17 desa dengan peserta purna PMI yang berusia produktif, yakni antara 25 hingga 45 tahun. Lebih dari itu, Program Perempuan Berdikari telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa program ini akan menjangkau 317 desa dan

kelurahan di seluruh wilayah Indramayu, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas.

Komitmen pemerintah daerah terhadap program ini ditegaskan oleh Bupati Indramayu, Nina Agustina, melalui Sekretaris Daerah, Rinto Waluyo. Beliau menekankan bahwa Program Perempuan Berdikari bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan upaya strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi para purna PMI. Dengan keterampilan dan akses permodalan yang diberikan, diharapkan para peserta dapat mengelola keuangan dengan lebih baik serta membangun usaha yang berkelanjutan dan mandiri.

Program Perempuan Berdikari tidak hanya fokus pada pemberian keterampilan dan modal, tetapi juga membawa harapan baru bagi para perempuan di Indramayu. Melalui program ini, mereka memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan komunitas di sekitarnya. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indramayu.

Penelitian ini penting dilakukan karena peran pemerintah daerah yang kurang optimal dalam hal ini dapat berdampak panjang terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indramayu. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan yang ada diperlukan untuk memahami sejauh mana intervensi pemerintah daerah telah berhasil menekan laju migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi tenaga kerja migran dan keluarganya (Almaahi, et al., 2022).

Pemerintah daerah secara teori, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja lokal yang kompetitif untuk mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mencari penghidupan di luar negeri. Pendekatan ini didukung oleh teori pembangunan

ekonomi daerah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui penciptaan usaha kecil dan menengah (UKM) serta penguatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal (Imron 2015). Namun, praktiknya di lapangan, Indramayu masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengembangan ekonomi lokal dan diversifikasi lapangan kerja, yang masih didominasi oleh sektor pertanian, dan jasa informal dengan pendapatan rendah.

Adanya fenomena sosial seperti tingginya tingkat perceraian dan problem pendidikan anak yang ditinggalkan juga menjadi efek samping dari fenomena migrasi ini. Dampak ini mempertegas kebutuhan akan keterlibatan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk dapat mencari nafkah tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Pemerintah daerah harus memainkan peran aktif dalam melakukan sosialisasi perlindungan hukum, mendirikan pusat keterampilan kerja lokal, dan membuka peluang usaha yang dapat mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat Indramayu tanpa harus bermigrasi (Budiman 2021).

Studi ini sangat penting dan relevan karena peran pemerintah daerah dalam mengatasi migrasi berlebihan belum optimal. Banyaknya permasalahan yang dihadapi pekerja migran asal Indramayu, baik di negara tujuan maupun dampak sosial di tanah air, menunjukkan bahwa intervensi yang lebih efektif dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Kebijakan-kebijakan yang ada saat ini memerlukan evaluasi dan peningkatan agar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan dukungan bagi mereka yang mempertimbangkan untuk bekerja di luar negeri. Dengan pendekatan berbasis bukti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkrit untuk pengembangan kebijakan daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi tenaga kerja migran dan keluarga mereka (Almaahi, et al. 2022)

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi program Perempuan Berdikari lebih efektif untuk pemerintah daerah dalam mendukung pengurangan migrasi tenaga kerja, termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan

pengembangan usaha lokal. Analisis ini juga akan diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan yang sudah ada dan bentuk nyata sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah tenaga kerja yang bermigrasi ke luar negeri dan juga memperkuat perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru di Indramayu.

Tingginya angka migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Indramayu ke luar negeri, terutama dari kalangan perempuan, menjadi persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti perceraian, pengasuhan anak yang terabaikan, dan ketergantungan terhadap remitansi. Pemerintah daerah telah merespons fenomena ini dengan meluncurkan kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi bagi purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar tidak kembali bermigrasi. Namun, meskipun telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD 2021–2026 dan didukung oleh peraturan kepala daerah, efektivitas pelaksanaan program ini di lapangan masih memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah Program Pe-Ri telah mampu menjangkau sasaran secara merata? Sejauh mana program ini berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan purna PMI? Dan apakah kebijakan ini benar-benar mampu menekan angka migrasi tenaga kerja di Kabupaten Indramayu?

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) Dalam Menekan Angka Migrasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Kabupaten Indramayu**". penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lebih dalam implementasi kebijakan Program Perempuan Berdikari (Pe-Ri) di Kabupaten Indramayu serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menekan angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri, khususnya dari perspektif pemberdayaan ekonomi lokal.

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah berikut ditemukan sebagai hasil dari deskripsi latar belakang penulis:

1. Kabupaten Indramayu memiliki tingkat migrasi tenaga kerja yang sangat tinggi, khususnya di sektor informal, akibat keterbatasan lapangan pekerjaan lokal dan ketimpangan ekonomi.
2. Banyak pekerja migran yang kurang mendapatkan informasi memadai tentang hak-hak mereka, risiko bekerja di luar negeri, dan perlindungan hukum yang tersedia, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak adil.
3. Program Perempuan Berdikari (Pe-Ri) yang bertujuan untuk menekan angka migrasi tenaga kerja belum sepenuhnya efektif karena adanya kendala dalam komunikasi, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi.
4. Ketergantungan masyarakat pada pekerjaan di luar negeri menunjukkan bahwa belum adanya upaya optimal dalam menciptakan peluang usaha dan pemberdayaan ekonomi lokal yang mampu menjadi alternatif bagi calon pekerja migran.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Indramayu, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Komunikasi pada Kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) Dalam Menekan Angka Migrasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana Implementasi Sumber daya pada Kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) Dalam Menekan Angka Migrasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Kabupaten Indramayu?.
3. Bagaimana Implementasi Disposisi pada Kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) Dalam Menekan Angka Migrasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Kabupaten Indramayu?.
4. Bagaimana Implementasi Struktur Birokrasi pada Kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) Dalam Menekan Angka Migrasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Kabupaten Indramayu?.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi yang diterapkan dalam Kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) berperan dalam menekan angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sumber daya yang dimiliki oleh Kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) dapat berkontribusi dalam menurunkan angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan yang ada dalam Kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) dan bagaimana disposisi tersebut mempengaruhi penurunan angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Indramayu.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan struktur birokrasi dalam Kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) berperan dalam mengurangi angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Indramayu.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik dan kebijakan publik. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani masalah migrasi tenaga kerja. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi isu serupa atau memperdalam analisis terkait implementasi kebijakan di daerah lain.

##### 2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan terkait penekanan angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri.
- b. Bagi Pemangku Kepentingan Lain: Memberikan gambaran kepada lembaga pendidikan, pelatihan, dan komunitas masyarakat mengenai strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan peluang kerja lokal dan mengurangi dorongan migrasi.
- c. Bagi Masyarakat: Menyediakan informasi yang bermanfaat tentang kebijakan pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat memahami program-program yang tersedia dan berkontribusi secara aktif dalam implementasinya.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Solichin 1997) mengungkapkan bahwa inti dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program mulai diterapkan. Implementasi kebijakan mencakup semua peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pedoman kebijakan resmi disahkan, baik dari sisi pengelolaan administrasi maupun dampak nyata yang dihasilkan pada masyarakat dan kejadian di lapangan. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi tahap krusial dalam memastikan kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya berhenti sebagai dokumen formal, tetapi benar-benar memberikan pengaruh yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami proses implementasi Program Perempuan Berdikari (Pe-Ri) di Kabupaten Indramayu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur Dinas Tenaga Kerja, pelaksana program di tingkat desa, dan peserta program. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode, serta member checking untuk memastikan ketepatan interpretasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan

untuk menggali faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan program.

Fenomena tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Indramayu menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah daerah. Salah satu penyebab utamanya adalah terbatasnya lapangan kerja lokal yang memadai, sehingga mendorong masyarakat, khususnya perempuan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, untuk mencari penghidupan di luar negeri. Kondisi ini berdampak pada munculnya berbagai persoalan sosial, seperti eksploitasi pekerja, ketidakstabilan keluarga, hingga pendidikan anak yang terbengkalai akibat ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri.

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu menginisiasi program Perempuan Berdikari (Pe-Ri), yang bertujuan memberdayakan perempuan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini menitikberatkan pada peningkatan keterampilan, penyediaan akses permodalan, serta pendampingan kewirausahaan, agar mereka dapat membangun usaha mandiri di daerah asal tanpa harus kembali bermigrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menciptakan kemandirian ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan luar negeri.

Untuk menganalisis efektivitas program ini, kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III dalam (Prmono 2020), yang menekankan pada empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini dianggap sebagai komponen kunci dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi sebuah kebijakan.

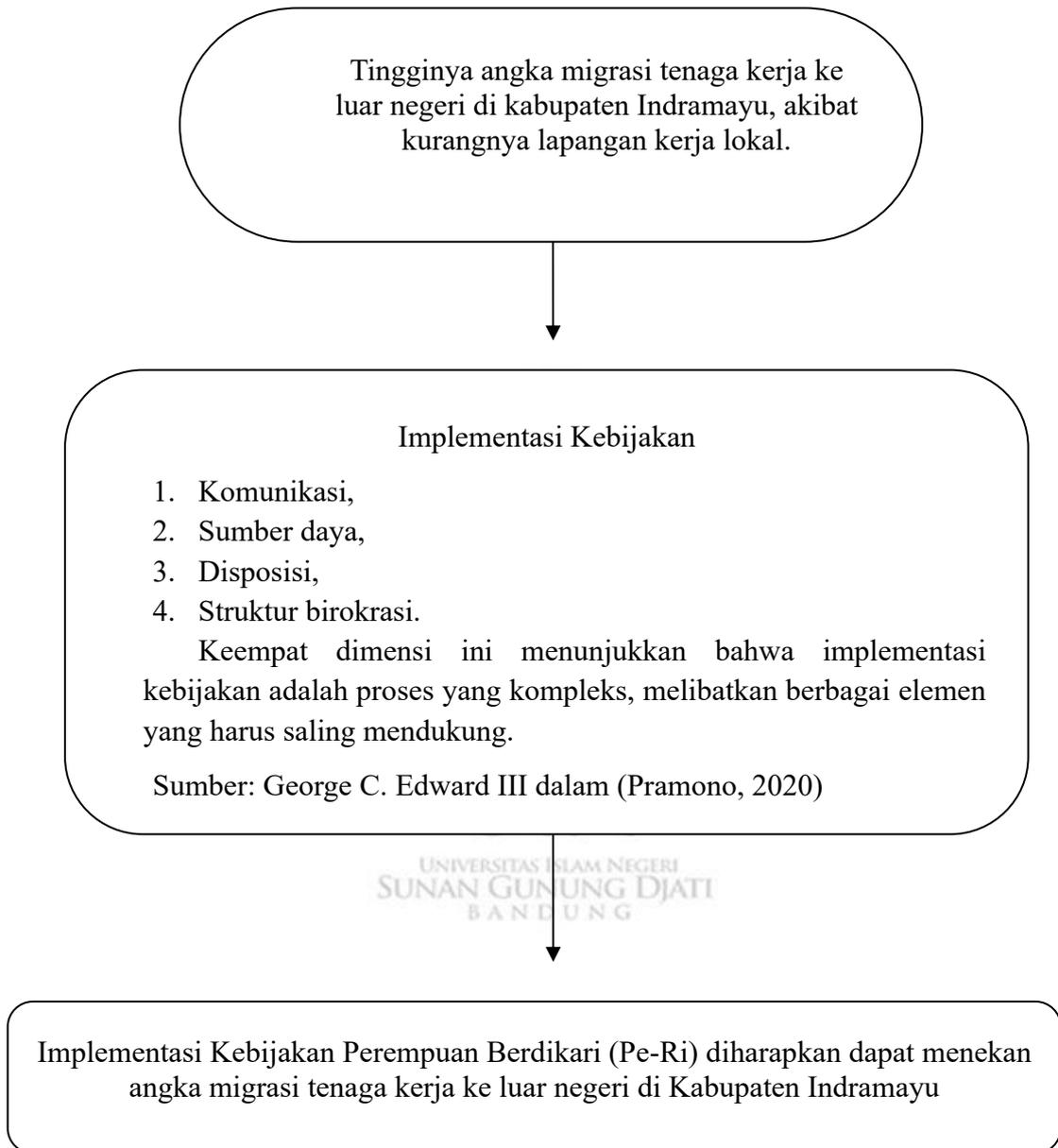
Pertama, komunikasi merujuk pada kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat sasaran. Dalam konteks ini, efektivitas sosialisasi program Pe-Ri menjadi penentu utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat program tersebut.

Kedua, sumber daya menyangkut ketersediaan dana, tenaga ahli, fasilitas, dan dukungan kelembagaan. Ketiadaan sumber daya yang memadai dapat menghambat pelaksanaan program, meskipun kebijakannya sudah dirancang dengan baik.

Ketiga, disposisi, yaitu sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan. Jika aparat pelaksana tidak memiliki kemauan atau motivasi yang kuat untuk menjalankan program, maka kebijakan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

Keempat, struktur birokrasi menyangkut sejauh mana sistem dan mekanisme kerja antarinstansi mendukung pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang buruk, tumpang tindih kewenangan, dan prosedur yang berbelit-belit menjadi tantangan yang harus diatasi dalam mengimplementasikan program Pe-Ri secara optimal.

Dengan menganalisis keempat dimensi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan Perempuan Berdikari mampu berkontribusi dalam menekan angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based) kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan demikian, angka migrasi tenaga kerja dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan eks-PMI di Kabupaten Indramayu, dapat meningkat melalui penguatan ekonomi lokal.



**Gambar 1. 1 Paradigma Pemikiran Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menekan Angka Migrasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Kabupaten Indramayu**

Sumber: Hasil Penelitian diolah peneliti (2024)